

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ahmad (2017) berpendapat bahwa kebutuhan akan kualitas pelayanan dan juga kualitas kebijakan publik itu selalu meningkat seiring dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Pemerintah sebagai salah satu pemegang dalam pembuatan kebijakan menjadi salah satu aspek penentu kebijakan apa yang akan diputuskan untuk masyarakat. Setiap keputusan yang dikeluarkan tentu memiliki tujuan ataupun kepentingan masyarakat. Pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pengawas dan juga pengatur segala kehidupan bermasyarakat yang pada dasarnya juga pemerintah juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Kembali kebijakan sangatlah berpengaruh pada dinamika masyarakat. Dalam pembuatan kebijakan itu sendiri tidak dapat dikeluarkan, diputuskan atau dibuat secara sembarangan karena dapat merugikan berbagai pihak termasuk masyarakat. Konsep *good governance* yang mengarah pada pengambilan keputusan bersama yang bertujuan untuk memberikan konsep sama dan adil dari berbagai pihak seperti pihak swasta, komunitas, akademisi ataupun dari media dan juga terutama pada masyarakat itu sendiri.

Sementara seorang ahli yaitu J. E. Anderson (2003:34) berpendapat bahwa Kebijakan didefinisikan sebagai bentuk yang stabil yang juga memiliki tujuan kemudian diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor yang bertujuan untuk menangani suatu masalah atau yang menjadi pusat perhatian. Kebijakan yang dibentuk atau dibuat dan kemudian di implementasikan ke

publik atau masyarakat tidak jauh dari tujuan utamanya yaitu untuk mengatur segala pergerakan kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya memiliki dasar yang sangat jelas dimana sebuah kebijakan beritik pada terwujudnya ketertiban, kehidupan yang teratur dan juga demi mencapai kesejahteraan sosial. Sebuah kebijakan tentunya perlu sebuah capaian yang harus diraih dengan adanya dukungan dari masyarakat. Dukungan ini dapat berupa berbagai bentuk salah satunya adalah dengan ikut andilnya masyarakat baik dari pihak swasta, akademisi, media atau masyarakat umum yang ingin ikut andil dalam pembuatan suatu kebijakan. Peranan ini juga tentunya diikuti proses dari awal hingga akhir, dalam hal ini dari proses perancangan, pembuatan, implementasi dan juga evaluasi. Masyarakat juga berperan menjadi kekuatan untuk mengontrol bagaimana kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan juga dapat melihat apakah kebijakan tersebut sudah tepat sasaran atau belum. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan juga akan berpengaruh pada kualitas kebijakan yang dikeluarkan pula, sebaliknya jika masyarakat berperan penuh dan berpartisipasi dalam proses tersebut maka kebijakan tersebut dapat diarahkan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bukan demi kepentingan tertentu.

Suatu kebijakan haruslah dapat memberikan dampak yang signifikan, positif, dan juga tidak menimbulkan kerugian dari berbagai pihak. Meskipun beberapa diantaranya masalah dapat timbul akibat implementasi kebijakan itu sendiri, yang kemudian kembali ditekankan bahwa dalam perumusan kebijakan harus dapat dijelaskan dan juga dasar apa atau kenapa kebijakan itu

diambil, dikeluarkan ataupun diimplementasikan kepada masyarakat. Keputusan ini menjadi salah satu keputusan yang cukup rumit dan proses yang sangat lama mengingat dampak yang muncul dan juga tentunya memberikan efek yang sangat luas kepada masyarakat. Sebuah kebijakan juga dapat dianggap gagal karena tidak tercapainya tujuan dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan juga tidak jauh dari adanya permainan perpolitikan atau persoalan politik yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Para pemegang kekuasaan tentunya memiliki kekuatan guna mengendalikan sebuah daerah atau negara.

Pada tahun 2020, menjadi titik berat bagi pemerintah khususnya di Indonesia kondisi pasar lokal kembali dibebani dengan keberadaan Covid-19 dengan nama ilmiahnya *Coronavirus Disease* yang melanda tidak hanya di Indonesia saja namun juga berbagai belahan diseluruh dunia. Virus Covid-19 ini pertama kali muncul atau terdeteksi berasal dari sebuah kota di China, yaitu Kota Wuhan. Virus ini diyakini berasal dari sebuah pasar Seafood Hunan. Pada Desember 2019 kemarin, merupakan kasus pada infeksi pernafasan (*pneumonia*), yang disebabkan sebuah penyakit yang dapat dibawa oleh hewan-hewan ekstrem yang dijual di pasar tersebut. Penyebaran Covid-19 ini membuat kondisi ekonomi di seluruh dunia terpuruk. Indonesia mengalami penyebaran yang sangat cepat dan juga sudah banyak memakan korban. Terhitung sejak bulan maret 2020 hingga penelitian ini dilakukan sudah merenggut korban sebanyak 142, 026 dinyatakan meninggal akibat Covid-19 (*Peta Sebaran | Covid19.Go.Id*, n.d.). Lalu untuk Kabupaten

Ketapang sendiri yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini untuk masyarakat yang meninggal akibat Covid-19 yang dikutip dari (PPID Ketapang, 2021) terhitung bulan oktober 2021 dengan kondisi Kabupaten Ketapang pada zona kuning berjumlah 139 warga Ketapang yang dinyatakan meninggal akibat Covid-19, dan 7.146 warga dinyatakan sembuh.

Demi menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat berbagai kebijakan akhirnya dibentuk dan implementasikan kepada masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 yang terus menyebar ke seluruh Indonesia. Kebijakan ini dibuat secara darurat mengingat korban yang ditimbulkan semakin banyak. Awal Covid-19 menyebar Indonesia bulan maret 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan PSBB atau singkatan dari Pembatasan Sosial Bersekala Besar yang berakhir pada Juni 2020. Kebijakan ini diimplementasikan ke beberapa daerah di Indonesia dengan berbagai syarat khusus seperti jumlah kasus Positif Covid-19 dan Angka kematian. Kebijakan PSBB ini menjadi salah satu kebijakan yang harus di usulkan terlebih dahulu oleh Pejabat Daerah, seperti Bupati, Wali Kota hingga Gubernur. Lalu pasca PSBB berakhir pada Juni 2020 kembali diberlakukan PSBB transisi dimana pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dan aturan yang sedikit berbeda dimana jika salah satu daerah yang sudah pernah melakukan PSBB dan mengalami penurunan jumlah pasien Covid-19 atau angka kematian akibat Covid-19 yang menurun dapat mengambil kebijakan PSBB transisi. Pada kebijakan ini juga setiap kegiatan masyarakat sedikit diperlonggarkan atau tidak seketat PSBB. Pemerintah

juga kemudian mengeluarkan kebijakan PPKM Jawa-Bali atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang kemudian diberlakukan juga PPKM Mikro di beberapa daerah. Perlu diketahui bahwa PPKM masih berlanjut hingga sekarang dengan berbagai perubahan nama seperti PPKM Darurat hingga PPKM Level 3 dan 4. Perubahan ini juga sebagai bentuk perpanjangan dari PPKM sebelumnya karena pada dasarnya masih terjadi peningkatan dalam identifikasi kasus Covid-19 di beberapa daerah dan tidak mengalami penurunan angka Positif Covid-19.

Lalu untuk khususnya Masyarakat Kabupaten Ketapang yang diberikan arahan oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan PPKM Mikro karena Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan konfirmasi Covid-19 yang membuat Ketapang sempat berada dalam zona merah, kemudian menurun menjadi orien dan sempat menjadi zona kuning. Kondisi yang tidak pasti ini membuat pemerintah Kabupaten Ketapang menetapkan PPKM Mikro sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 711 / KESRA / 2021 dan surat edaran dari Kementrian dalam Negeri yaitu sebuah Intruksi Nomor 27 Tahun 2021 tentang adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berdsarkan level 1-4 dan juga yang berbasis mikro di tambah dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Berdasarkan Surat Edaran tersebut maka pasar lokal yang berada di Kabupaten Ketapang yang menjadi salah satu sektor esensial tetap beroperasi 100% namun dengan pengaturan jam

operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, kapasitas pasar, dan juga penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Berlakunya SK tersebut juga menjadi rintangan tambahan bagi para pedagang pasar. Berlakunya SK dari Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Ketapang, harus tetap melakukan evaluasi mendalam dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi perekonomian masyarakat Ketapang, khususnya Para Pedagang pasar yang terkena imbas dari pembatasan kegiatan ini. Mengingat Kabupaten Ketapang menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat seperti pengiriman barang ataupun bahan pokok yang di kirim dari dan ke pulau Jawa sebelum di kirim ke berbagai daerah ataupun kecamatan lain yang ada di Kabupaten ketapang. Kebijakan ini juga mengalami beberapa kendala dimana masih banyak masyarakat Ketapang yang tidak menghiraukan kebijakan ini dengan melanggar Prokes atau Protokol Kesehatan yang berlaku, seperti tidak menjaga jarak atau menggunakan masker saat berpergian keluar rumah. Dengan demikian Pemerintah harus dapat menentukan bagaimana kedepannya apakah kebijakan PPKM Mikro akan tetap diberlakukan atau tidak. Berbeda dengan di pulau Jawa, untuk PPKM di Kabupaten Ketapang memang tidak seketat PPKM di pulau Jawa, akan tetapi ini setidaknya ada persamaan dalam pengimplementasiannya. Seperti masih ditemukannya bahwa menggunakan masker di tempat umum hanya seperti formalitas belaka agar tidak tertangkap oleh pihak dari pemerintahan dalam hal ini SatPol PP yang biasa merazia warga khususnya warga Ketapang. Namun disisi lain ekonomi menjadi

terpuruk akibat banyaknya warung ataupun toko yang tidak bisa berjualan karena peraturan pemerintah daerah yang tidak membolehkan pemilik toko untuk membuka tokonya tidak lebih dari jam 9 malam. Kasus ini menjadi menarik dan menjadi perhatian masyarakat Kota Ketapang, dimana kasus ini berujung pada adanya rapat Aspirasi dari berbagai pihak terutama Pengusaha Café Ketapang, karena mereka menganggap bahwa peraturan ini tidak adil dan terdapat celah. Kasus lain juga ditemukan bahwa terdapat pelanggaran Protokol kesehatan, dikutip dari (PONTV, 2021) ditemukan pelanggaran dalam satu tempat (Café) dimana terdapat pelanggaran Protokol Kesehatan mencapai 128 orang/pengunjung café.

Di sisi lain selain dari dampak ekonomi yang terjadi sejak adanya PPKM Mikro di Kabupaten Ketapang juga berdampak pada Sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya peningkatan pengangguran akibat banyaknya kegiatan para pedagang yang terhenti akibat tutupnya toko karena terjadi penurunan jumlah pembeli. Hal ini membuat toko-toko mengalami kerugian yang sangat besar dan juga harus memecat para pekerja mereka karena tidak mampu membayar gaji mereka akibat kerugian. Pembatasan PPKM Mikro yang diberlakukan juga khusus untuk tingkat RT /RW dengan mendirikan posko-posko Covid-19. Pembatasan ini juga guna menekan penyebaran virus Covid-19 yang mengakibatkan kegiatan masyarakat di RT/RW setempat menjadi terganggu. Di sisi lain adalah menurunnya kualitas pendidikan siswa akibat kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring ataupun *online*. Mengingat regulasi PPKM Mikro yang membuat segala kegiatan disekolah

harus dilakukan secara daring, maka segala kegiatan pembelajaran harus dilakukan di rumah masing-masing. Dampak dari kegiatan pembelajaran secara daring ini sendiri membuat beban baru khususnya para orang tua dari siswa dan siswi. Dimana dalam kegiatan pembelajaran ini orang tua mau tidak mau harus memenuhi kebutuhan untuk kegiatan online tersebut, seperti menyediakan *gadget* ataupun *handphone* yang digunakan untuk melakukan kegiatan daring, ditambah juga harus menyediakan kuota untuk mengoneksikan ke internet. Namun hal ini juga tidak mudah jika kondisi keuangan dari orang tua para siswa kurang mampu dalam memberikan fasilitas tersebut karena pandemi Covid-19 yang membuat mereka kesusahan dalam mencari uang. Beberapa kasus yang sama juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah dalam penelitian (Nuraeny et al., 2021) yang dilakukan di di Kebumen dengan objek penelitian adalah para pedagang dengan temuan bahwa PPKM berpengaruh negatif khususnya pada ketahanan fisik dan ketahanan ekonomi pedagang. Pengaruh ini juga memberikan beberapa penurunan kegiatan produksi, penurunan omzet dan juga pendapatan. Dari kemiripan yang terjadi maka Implementasi ini juga menjadi perhatian besar khususnya bagi pemerintah agar dapat mengevaluasi dampak dari implementasi kebijakan PPKM Mikro.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang sudah diterangkan sebelumnya diatas maka peneliti mengambil rumusan masalah utama yaitu, bagaimana implementasi kebijakan

PPKM Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang? Dan apa saja faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi PPKM Mikro dan hambatannya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam Implementasi kepada Masyarakat Ketapang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan PPKM Mikro yang terjadi di Kabupaten Ketapang

1.4 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penulisan ini diharapkan menjadi salah satu saran dalam mengembangkan dan penambahan ilmu Pengetahuan khususnya dalam Ilmu Pemerintahan dan menjadi wawasan baru mengenai kebijakan publik.

b. Praktis

- a) Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca dalam melihat bagaimana kinerja Pemerintah dalam mengevaluasi program yang dilaksanakan.

- b) Penelitian ini juga bermanfaat untuk para peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian sebelumnya ataupun menjadi salah satu sumber referensi dalam penelitian selanjutnya.
- c) Penelitian ini juga bermanfaat bagi Pemerintah sebagai bentuk evaluasi serta gambaran bagaimana yang sebenarnya mengenai dampak yang diberikan dari pemberlakuan kebijakan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada penelittian ini menggunakan beberapa tinjauan pustaka ataupun biasa disebut dengan menggunakan penelitian terdahulu guna menambah wawasan dan gambaran serta pemahaman mengenai implemnetasi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	(Fauzi, 2020)	Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Penanganan Pandemi Covid-19	Dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menjelaskan bahwa PSBB menjadi salah satu metode dan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah guna menangani Pandemi Covid-19. Banyaknya korban akibat Covid-19 yang disebabkan belum adanya “obat” yang mampu menyembuhkan orang dari penyakit atau wabah ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian PSBB ini. Temuan pertama menjelaskan bahwa tidak semua penyelenggara paham akan kebijakan PSBB yang diberlakukan, karena masih belum dalam 1 arahan dari pusat atau komando yang dikeluarkan yang mengakibatkan bias dalam proses implementasinya. Kedua masih ditemukannya kepala daerah yang belum paham akan kebijakan PSBB.
2.	(Muis, 2020)	Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam	Dalam artikel ini menjelaskan bahwa berbagai macam negara yang mengalami atau terdampak dari Pandemi Covid-19 mengalami

		Menanggulangi Pandemi Covid-19	<p>berbagai masalah pada sektor ekonomi hingga pendidikan. Konsep transparansi pemerintah dalam kebijakan yang dikeluarkan menjadi kunci utama dalam keberhasilan karena menjadi penentuan hasil yang efektif dari kebijakan tersebut dan juga menjadi percepatan penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam artikel ini yang melakukan analisis transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah di berbagai negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, Vietnam dan beberapa negara lainnya menjadi negara yang berhasil dalam menerapkan konsep transparansi kepada masyarakat dan juga sebagai wujud dari adanya <i>goodgovernance</i>. Sehingga dari artikel ini menjadi salah satu studi komparasi dan juga learning experience khususnya untuk Indonesia.</p>
3.	(Herdiana, 2020)	Konstruksi konsep social distancing dan lockdown dalam perspektif kebijakan publik	<p>Dalam artikel ini yang melakukan penelitian dengan menggunakan <i>midel-bulding method</i> dengan pendekatan deskriptif yang menekankan pada konstruksi dari konsep <i>social distancing</i> dan juga <i>lockdown</i>. Kedua konsep tersebut menjadi salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai penanggulangan wabah Covid-19 . Kedua konsep itu juga memiliki fungsi masing-masing, <i>social distancing</i> sebagai upaya reduktif guna mebatasi kegiatan penduduk, lalu untuk <i>lockdown</i> sendiri menjadi salah satu bentuk pembatasan penduduk secara terpadu. Maka kedua konsep tersebut menjadi salah satu peranan dari pemerintah sebagai pengatur dan juga penentu dari segala aktivitas masyarakat namun dengan syarat masyarakat masih dapat mengakses segala bentuk kebutuhan kehidupan dan juga pemerintah juga harus dapat menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya karena beberapa akses tidak bisa dilakukan untuk keberlangsungan hidup.</p>
4.	(Lambajang et al.,	Pengaruh Pengetahuan Tentang	Dalam penelitian ini yang menggunakan metode <i>purposive sampling</i>

	2018)	Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara	yang dimana responden adalah anggota DPRD Kota Manado dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini juga menggunakan analisis data <i>regresi linear berganda</i> guna menguji secara empiris pengaruh penelitian ini. Penelitian ini menemukan beberapa temuan bahwa, pertama pengetahuan akan anggaran dan partisipasi warga atau masyarakat dan akuntabilitas publik juga sangat berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap akan pengawasan keuangan daerah dan untuk transparansi akan kebijakan publik dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.
5.	(Yulita et al., 2018)	Model Strategi Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pasar Tradisional Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat.	Dalam penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis <i>SWOT</i> yang digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan publik di sektor pasar tradisional yang pada dasarnya menjadi elemen penting selain kepada masyarakat juga berpengaruh terhadap PAD atau pendapat asli daerah. Penelitian ini juga mengarah pada manajemen strategi kebijakan publik dan juga mengeksplorasi usulan dari model manajemen strategi guna meningkatkan PAD. Temuan dari penelitian ini adalah kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah belum dapat berjalan maksimal dan juga belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Bengkayang karena pada strategi yang digunakan adalah masih bersifat <i>non-technology based</i> , namun guna meningkatkan PAD maka manajemen strategi tersebut diganti dengan <i>integrated market management strategic</i> .
6.	(Ekp et al., 2020)	Merrespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia	Penelitian ini mengarah bagaimana respon publik terhadap kebijakan negara dalam penanganan Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur study atau studi literatur dan juga gabungan dari beberapa jurnal, buku dan juga beberapa media guna

			<p>mendapatkan hasil yang maksimal. Pendekatan yang rasional digunakan sebagai salah satu cara untuk menganalisis argumen dan dalam penelitian ini memiliki temuan yang dimana dijelaskan bahwa kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah memiliki alasan yang rasional, kondisi kesehatan yang logis dapat diterima oleh masyarakat. Tetapi terdapat perbedaan yang cukup besar terutama pada masyarakat kelas menengah ke bawah karena terbatas nya Sumber Daya dan juga harus menekan atau paksaan terhadap nalar rasionalitas yang ada dalam kebijakan publik. Maka dalam penelitian ini juga mengarah pada adanya jaminan oleh pemerintah untuk menjamin keamanan dan juga ekonomi masyarakatnya ditengah pandem Covid-19</p>
7.	(Nasirin & Hermawan, 2017)	Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia	<p>Dalam penelitian dalam hal implementasi kebijakan Penenggelaman kapal ini mendapatkan tanggapan pro dan kontra. Kebijakan yang diambil mengingat banyaknya pencurian ikan di perairan laut Indonesia yang menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama pada sektor perikanan. Melalui kebijakan ini dengan tujuan memberantas adanya <i>Illegal Fishing</i> dengan menenggelamkan kapal pelaku pencurian ikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dan juga studi dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menemukan hasil bahwa Kebijakan penenggelaman kapal <i>top down</i> dapat dilaksanakan dengan adanya kepastian peraturan diikuti dengan komando yang kuat, koordinasi yang baik, anggaran yang didukung dan juga adanya <i>support</i> dari birokrasi yang kuat.</p>
8.	(Mahmud, 2020)	Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Perumukiman di	<p>Penelitian ini menjelaskan bagaimana interaksi yang terjadi antara para aktor dalam proses perumusan sebuah kebijakan publik. Kebijakan yang membahas mengenai salah satu kebijakan</p>

	Provinsi DKI Jakarta)	<p>perumukman yang ada di Provinsi DKI Jakarta dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus atau <i>case study</i>. Kebijakan publik yang terjadi adanya interaksi antara aktor ini terjadi secara <i>bargaining</i>. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kontrak politik sebagai bentuk dari adanya proses interaksi antar aktor dalam pembuatan kebijakan. Interaksi ini disebut dengan interaksi kooperatif dan juga interaksi akomodatif. Kedua interaksi ini cenderung efektif dalam hasil atau <i>decision</i> yang dibuat dalam pembuatan kebijakan pemukiman masyarakat tanpa pengurusan.</p>
9.	(Kanna, 2018)	<p>Dalam skripsi yang membahas mengenai implementasi Perda No 8 Tahun 2016 mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu. Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah, Masyarakat dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang bersumber dari beberapa narsi, informasi dari Informan, dokumen penting dan foto. Akhir skripsi ini menemukan hasil bahwa kebijakan penanggulangan bencana yang dilaksakana di Kabupaten Luwu menunjukkan hasil yang positif karena kebijakan sudah sesuai dengan keiinginan. Hasil ini dapat dilihat dari adanya keterlibatan BPBD dengan LSM yang melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik. Dengan adanya kerjasama dan koordinasi tersebut menjadi pendorong dalam pengimplementasikan kebijakan tersebut.</p>
10.	(Pujaningsih & Sucitawathi, 2020)	<p>Dalam penelitian yang dilakukan di Provinsi Bali melihat bagaimana kebijakn PSBB yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, namun untuk wilayah Pemerintahan Bali menetapkan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bali Nomor 32 Tahun 2020 tentang PKM masyarakat di Desa, kelurahan</p>

dan Desa Adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengambil beberapa sumber data seperti dari jurnal ilmiah, buku ataupun web yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa PKM yang dilakukan di Kota Denpasar membatasi beberapa kegiatan masyarakat, seperti adanya pembatasan kerumunan, penggunaan masker, pembatasan aktivitas kendaraan hingga pembatasan jam operasional usaha (Toko) dan juga hasil dari Penerapan PKM di Kota Denpasar ini sudah berjalan dengan baik dengan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti dari pihak adat desa dan instansi lain seperti TNI hingga Polri yang membuat kegiatan PKM dapat berjalan dengan efektif.

Jika diklasifikasikan maka dapat diambil beberapa klasifikasi sebagai berikut, pertama jika dilihat dari temanya yang membahas mengenai implementasi yaitu, (Fauzi, 2020; Kanna, 2018; Nasirin & Hermawan, 2017) membahas mengenai implementasi yang digunakan seperti implementasi dalam kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Bersekala Besar dan juga Perda yang dikeluarkan pemerintah. Ketiga penelitian sebelumnya ini menemukan 2 aspek yang berbeda dimana ditemukan ada dua kemungkinan bagaimana implmentasi tersebut dapat berjalan dengan baik ataupun sebaliknya. Kedua, untuk klasifikasi ini berdasarkan bagaimana transparansi pemerintah, penelitian tersebut dilakukan oleh (Muis, 2020; Lambajang et al., 2018; Yulita et al., 2018). Dari tiga penelitian ini yang memiliki kesamaan dalam membahas bagaimana tranparansi pemerintah kepada masyarakat. Ketiga untuk klasifikasi ini berdasarkan kebijakan penanganan Covid-19 yaitu (Herdiana, 2020; Ekp et al., 2020). Kedua penelitian ini mengarah bagaimana kebijakan tersebut dibuat dengan alasan rasional dan login serta dampaknya kepada masyarakat. Klasifikasi keempat ini berdasarkan aktor pelaksanaan kebijakan (Mahmud, 2020; Pujaningsih & Sucitawathi, 2020), dari dua penelitian ini membahas bagaimana pentingnya interaksi antar aktor dan fungsi dari adanya sinkronisasi dan kerjasama antar berbagai aktor agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan.

Dari beberapa penelitian dan skripsi diatas dapat diambil beberapa kemiripan yaitu membahas kebijakan publik yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Pusat ataupun daerah. Peranan aktor-aktor dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap suatu kualitas kebijakan publik khususnya kebijakan yang dialami langsung oleh masyarakat seperti Kebijakan PPKM guna menekan penyebaran Covid-19. Lalu yang membuat perbedaan skripsi ini dengan skripsi lainnya adalah terdapat pada daerah yang diteliti berbeda dan juga UU yang digunakan dalam skripsi ini.

1.6 Kerangka Teori

a. Kebijakan Publik

Pada dasarnya kebijakan publik menjadi salah satu penyelenggaraan oleh pemerintah dengan keterlibatan berbagai pihak dalam pembuatan kebijakan tersebut terutama swasta dan juga masyarakat itu sendiri. Terdapat beberapa tahapan sebelum sebuah Kebijakan Publik dapat diimplmentasikan secara utuh dan berjalan dengan baik. Ada tiga tahapan Kebijakan publik sendiri, (Thomas R. Dye, 1981) menjelaskan bahwa kebijakan publik terbagi dalam 3 proses yaitu, perumusan masalah, lalu kebijakan publik dan evaluasi dari penerapan kebijakan tersebut. Thomas R. Dye juga dalam bukunya yang berjudul *Understanding public policy* edisi ke 4 dan terakhir edisi ke-15. Dalam buku ini Thomas R dan Dye menjelaskan bahwa “Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih/ditentukan oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak untuk dilakukan. Pendapat lain mengenai kebijakan publik juga dijelaskan oleh (Islamy, 2009) yang menjelaskan bahwa “kebijakan publik merupakan

serangkaian tindakan-tindakan yang sudah ditetapkan dan juga dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang pada dasarnya mempunyai tujuan ataupun berorientasi pada tujuan tertentu guna kepentingan seluruh masyarakat”. Pendapat lain juga dijelaskan oleh (James E Anderson, 1979) dalam mengartikan kebijakan publik sebagai bentuk serangkaian dari sebuah tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan juga diikuti dengan adanya pelaksanaan oleh seseorang ataupun sekelompok pelaku dengan tujuan memecahkan sebuah masalah tertentu. Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik makna bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah mengenai apa yang boleh dilakukan ataupun yang tidak dilakukan dengan memiliki dasar ataupun tujuan tertentu.

Pengertian atau teori lain juga muncul mengenai kebijakan publik, seperti yang diterangkan oleh W.I Jenkins dengan bukunya “*Policy Analysis*” yang kemudian dikutip didalam buku Abdoellah (2006:71-74) dengan jelas mengatakan bahwa “Kebijakan pemerintahan diambil berdasarkan keputusan yang saling terhubung dari seseorang ataupun kelompok dari aktor politik yang sudah dipilih serta berbagai cara-cara guna mencapai suatu titik dimana keputusan yang dibuat sudah berdasarkan prinsip dan masih dalam ruanglingkup kewenangan aktor-aktor tersebut. Kebijakan publik juga dijelaskan oleh Chief J.O Udoji dalam buku Abdoellah (2006:71-74) juga yang memperjelas mengenai *public policy* mengarah pada suatu tindakan bersanksi dengan alasan atau tujuan tertentu

yang dituju pada suatu masalah yang berkaitan langsung dengan masalah besar masyarakat.

Menurut Abdoellah (2006: 71-74) dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Analisis Kebijakan Publik” mengemukakan ciri-ciri dari kebijakan pemerintah atau publik:

- 1) Kebijakan publik lebih mengarah pada suatu tindakan dengan hasil atau tujuan, bukan seperti bentuk dari sebuah perilaku atau tindakan yang terjadi secara spontan tetapi sudah di rencanakan dari awal.
- 2) Kebijakan pada hakikatnya merupakan dari pola-pola dari sebuah tindakan yang saling terhubung yang dikeluarkan oleh para pejabat pemerintah bukan dari keputusan individu atau sendiri.
- 3) Kebijakan pada dasarnya saling terkoneksi atau terhubung dengan segala yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang-bidang tertentu atau dalam arti lain segala kebijakan pemerintah tersebut diikuti juga dengan tindakan konkret.
- 4) Kebijakan pemerintah sejatinya memiliki 2 bentuk yaitu positif dan juga negatif. Dalam bentuknya yang positif kebijakan tersebut dibuat guna mempengaruhi atau mengontrol sebuah masalah tertentu. Namun jika dalam bentuk negatif, maka kebijakan tersebut terdapat keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh para pejabat untuk tidak menanggapi dan tidak bertindak dalam menyelesaikan masalah apapun yang seharusnya perlu adanya campur tangan dari pemerintah.

Dalam buku Abdoellah, (2006:71-74) juga memaparkan mengkategorikan hakikat kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) *Policy Demands* atau tuntutan kebijakan yang diarahkan kepada para pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor tertentu, misal dari pihak swasta atau dari pihak pemerintahan itu sendiri guna melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan melakukan sesuatu terhadap masalah.
- 2) *Policy Decision* atau keputusan kebijakan. Merupakan hasil sebuah keputusan yang dihasilkan dari pertemuan para pejabat pemerintahan guna memberikan kewenangan, keabsahan dan juga memberikan arah pelaksana kebijakan pemerintah.
- 3) *Policy Statement* atau pernyataan kebijakan. Maksudnya adalah pernyataan resmi atau penjelasann mengenai kebijakan pemerintah atau kepada kebijakan publik. Misalnya pada keputusan Presiden atau bahkan ketetapan-ketetapan MPR yang menunjukkan adanya keinginan merealisasikan tujuan dari pemerintah itu sendiri.
- 4) *Policy Outputs* atau keluaran kebijakan. Dapat diartikan sebagai bentuk atau wujud dari kebijakan pemerintah yang dapat dirasakan dan dilihat secara langsung menyangkut pada proses realisasi berdasarkan keputusan dan pernyataan kebijakan. Pada dasarnya keluaran kebijakan ini memberikan pandangan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan pada hasil akhir.
- 5) *Policy Outcomes* atau Hasil akhir kebijakan. Sebuah bentuk akibat ataupun dampak yang muncul dan benar-benar dirasakan oleh

masyarakat baik sesuai dengan yang diharapkan ataupun yang tidak seharusnya terjadi sebagai bentuk konsekuensi dari tindakan pemerintah atau masalah tertentu yang ada didalam masyarakat.

b. Implementasi Kebijakan

Secara bahasa penggunaan kata “*implementasi*” dapat diartikan dengan KBBI atau kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah pelaksanaan ataupun penerapan. Maksud dari pelaksanaan sendiri jika dalam ranah pemerintahan dapat dimaksudkan dengan sebuah kebijakan yang mulai berjalan ataupun berlaku sesuai ketetapan yang telah ditentukan dan penerapan sebagai bentuk berjalannya kebijakan tersebut dari awal hingga akhir. Disisi lain Setiawan (2004:39) menjelaskan bahwa Implementasi merupakan sebuah bentuk perluasan atas aktivitas yang menyelaraskan interaksi antara tujuan dan tindakan guna mencapai tujuan memerlukan adanya efektivitas jaringan antar birokrasi.

Lalu pendapat lain dari Grindle & Mason (2017) yang didalam buku ini merupakan pembaharuan dari buku lamanya yang diterbitkan tahun 1980 kemudian diperbarui. Dalam buku tersebut Grindle dan Mason menjelaskan bahwa Implementasi merupakan sebuah proses umum dari sebuah tindakan administratif dan juga dapat diteliti pada tingkatan program tertentu. Pendapat lain juga dikeluarkan (Meter et al., 1975) menjelaskan bahwa sebuah implementasi kebijakan adalah sebuah bentuk tindakan yang dilakukan oleh *Government* atau Pemerintah dan juga pihak

swasta yang dilakukan secara individu ataupun secara berkelompok dengan maksud guna mencapai tujuan.

Pendapat lain dikeluarkan oleh (Syaukani et al., 2002) menjelaskan bahwa implementasi merupakan salah satu tahap di dalam proses sebuah kebijaksanaan publik dalam sebuah negara, yang dimana implementasi tersebut dilaksanakan pasca sebuah kebijakan dirumuskan dengan dasar tujuan yang jelas baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Teori lain juga datang dari Leslie A. Pal dalam widodo yang dikutip dari (Winarno, 2007) yang menjelaskan implementasi kebijakan jika dalam sudut pandang yang luas maka implementasi kebijakan tersebut merupakan sebuah alat administrasi hukum yang didalamnya terdapat berbagai aktor ataupun sebuah organisasi, adanya prosedur dan juga teknik yang menjalin kerjasama dengan tujuan menjalankan searta meraih dampak yang diinginkan (Winarno, 2007).

Dari beberapa penjenjelasn teori diatas maka dapat diambil makna bahwa bahwa implmentasi bahwasannya merupakan sebuah pelaksanaan atas aktivitas dengan tujuan tertentu dengan keterlibatan berbagai pihak dan juga dilaksanakan dalam jangka pendek ataupun panjang. Namun dalam implementasi sebuah kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor. Evaluasi dari implementasi kebijakan sendiri tidak dapat menjadi patokan selesainya atau tercapainya tujuan ataupun cita-cita yang sudah dinginkan, karena dari evaluasi itu sendiri masih dapat menghadirkan kegagalan apabila tidak evluasi dengan baik.

Dalam pandangan Edward III mengeluarkan beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya keberhasilan atas sebuah implementasi kebijakan yang dikeluarkan

1) *Communication* (Komunikasi)

Komunikasi ini menjadi salah satu syarat bagi seorang implementor untuk mengetahui apa atau tahapan yang harus dilakukan atau dalam artian lain terjadinya komunikasi dalam pemberian informasi dari komunikator kepada komunikan. Bentuk komunikasi dalam implementasi kebijakan ini digunakan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam komunikasi kebijakan juga mempunyai dimensi seperti *transmission*, *calrity* dan *consistency*.

2) *Resource* (Sumber Daya)

Sumberdaya yang ada menjadi salah satu pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang ada dapat dalam berbagai wujud, yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau aparatur harus memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas ataupun arahan dari pimpinan atau atasan guna menjalankan implementasi kebijakan dengan baik. Kedua sumber daya anggaran, anggaran yang terbatas menyebabkan tidak maksimalnya pelayanan kepada publik yang berdampak pada disposisi atau *displacement* yang terjadi terhadap para pelaku guna mencapai tujuan. Ketiga sumber daya peralatan, Edward III menjelaskan bahwa Sumber daya peralatan ini menjadi sarana yang dapat digunakan sebagai

operasionalisasi implementasi kebijakan. Perlatan ini dapat berbentuk dari fasilitas gedung atau tanah dan sarana pendukung dalam memudahkan pelayanan kebijakan dan yang terakhir sumber daya informasi serta kewenangan. Informasi dan kewenangan ini sangat penting mengingat perlunya kesanggupan dari berbagai pihak dalam implementasi kebijakan. Hal ini terjadi agar tidak terjadi kesalahan dalam proses menginterpretasikan.

3) *Disposition* (Disposisi)

Bentuk ini adalah watak atau sebuah karakteristik atau dapat dikatakan seperti kejujuran, adanya komitmen, atau sifat demokratik yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. Karakteristik para pelaksana kebijakan seperti ini akan memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan dengan baik dan juga sesuai ssaran yang diinginkan. Adat tiga elemen yang dapat mempengaruhi atas disposisi tersebut yaitu, *cognition*, *comprehension* dan *understanding*.

4) *Bureaucratic Structur* (Struktur Birokrasi)

Struktur birokrasi menjadi badan yang terlibat sebuah implementasi kebijakan yang ada. Pada Organisasi atau struktur birokrasi terdapat beberapa aspek penting yang menjadi andalan utama dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu pelaksanaan SOP atau Standar Operasional Prosedur. SOP ini menjadi bagian utama atau pedoman dalam menjalankan organisasi atau sebuah birokrasi

Lalu dalam sebuah implementasi kebijakan Publik, perlu adanya indikator dalam implementasinya. Dalam bukunya (Shabbir Chema et al., 1983) yang dikutip oleh (Agus Purwanto & Ratih Astuti, 2012) mengemukakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik:

1) Kondisi Lingkungan

Faktor lingkungan yang mencakup berbagai sektor terutama pada kondisi geografi pada suatu daerah, Sosial masyarakat, dan juga Kondisi Ekonomi yang dimana kebijakan tersebut diberlakukan oleh Pemerintah setempat

2) Hubungan antar Organisasi

Dalam hal ini, kualitas koordinasi serta adanya dorongan guna menjalin kerjasama yang baik diantara Organisasi, baik dari Organisasi Pemerintah atau antar Pemerintah guna proses implementasi kebijakan yang dilakukan.

3) Sumber Daya

Salah satu point penting bagi implementor dan menjadi perhatian dimana kondisi Sumber daya sangat berpengaruh terhadap penunjang implementasi dari sebuah kebijakan, baik didalam organisasi Pemerintah maupun kondisi Sumber Daya yang ada dilapangan.

4) Karakter yang terdapat pada institusi Implementor

Dalam hal ini perlu adanya kesanggupan dari implementor dalam menjalankan implementasi kebijakan dengan penuh rasa tanggung

jawab yang sudah diberikan kepadanya dengan arahan yang telah ditentukan tugas dan fungsi implementor itu sendiri.

Disisi lain pendapat dari ahli James E. Anderson ada 8 indikator yang berpengaruh terhadap sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah

- 1) Sumber yang kurang ataupun tidak mencukupi
- 2) Metode dalam pelaksanaan sebuah kebijakan
- 3) Masalah publik karena berbagai faktor yang terjadi
- 4) Respon masyarakat dan pembiasaan diri dengan kebijakan yang dibuat
- 5) Tujuan dari kebijakan yang bertentangan
- 6) Dana yang besar
- 7) Penyelesaian masalah yang tidak mungkin
- 8) Keterkaitan dari sifat masalah yang diselesaikan dengan bentuk tindakan kebijakan

Dari ke 8 indikator tersebut, penulis menyatukan beberapa indikator salah satunya adalah dana yang kemudian dijadikan satu dengan sumber karena “dana” sendiri merupakan bagian dari sumber. Jadi, indikator yang peneliti gunakan menjadi hanya 7 indikator saja. Dari kedua faktor dari dua tokoh ahli yang berbeda maka beberapa point tersebut dapat menjelaskan mengapa beberapa kebijakan publik tidak dapat terimplementasikan dengan baik karena adanya berbagai faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut harus dapat di evaluasi dengan baik agar dapat mendukung secara penuh implementasi yang dilakukan.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual ini merupakan sebuah unsur dalam penelitian yang menjelaskan mengenai karakteristik dari sebuah masalah yang akan dilakukan penelitian dengan berlandaskan teori yang telah dipaparkan sebelumnya dan dalam penelitian ini yang lebih mengarah pada penelitian Implementasi PPKM Mikro Kabupaten Ketapang. Maka dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil beberapa definisi konseptual sebagai berikut:

a. Kebijakan Publik

Penjelasan mengenai kebijakan publik dapat diartikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah mengenai apa yang harus dilakukan ataupun tidak dilakukan dengan dasar tertentu.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan tahapan dari proses penerapan kepada masyarakat dan dapat dijelaskan sebagai bentuk dari pelaksanaan pemerintah sebagai bentuk aktivitasnya sebagai perwakilan dari masyarakat guna menggapai tujuan tertentu dan juga keterlibatan berbagai pihak dalam proses pelaksanaannya.

1.8 Definisi Operasional

Dalam Definisi Operasional agar memiliki konsep data yang akan diteliti secara empiris maka harus dapat dioperasionalisasikan dengan merubahnya menjadi beberapa variabel ataupun *point* utama yang memiliki nilai penting

dalam penelitian. Maka penelitian ini, definisi operasional yang digunakan oleh James E. Anderson dapat digunakan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
<i>Implementasi Kebijakan PPKM Mikro Kabupaten Ketapang</i>	<i>Source (Sumber)</i>	Kemampuan sumber - Sumber Daya Manusia - Sumber Daya Alam - Dana
	<i>Method (Metode)</i>	Penggunaan Metode Dalam Kebijakan
	<i>Problem (Masalah)</i>	Penyelesaian masalah publik
	<i>Response (Respon)</i>	Peningkatan Respon Masyarakat
	<i>Goal (Tujuan)</i>	Keberhasilan dari tujuan yang diinginkan
	<i>Solution (Solusi)</i>	Penyelesaian masalah yang timbul
	<i>Linkages (Keterkaitan)</i>	Mengaitkan dengan kondisi yang terjadi
<i>Faktor-faktor Implementasi Kebijakan</i>	<i>Kondisi Lingkungan</i>	- Geografi - Ekonomi - Sosial
	<i>Hubungan antar Organisasi</i>	Organisasi Pemerintah Daerah
	<i>Sumber Daya</i>	Sumber Daya Manusia (Implementor), Sumber Daya Alam

	<i>Karakter yang terdapat pada institusi Implementor</i>	Tanggung Jawab Impelementor
--	--	-----------------------------

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah atau suatu cara yang dalam bentuk sistematis yang digunakan untuk menyusun ilmu pengetahuan (Prof. Dr. Suryana, 2012). Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mencari kebenaran dan melakukan pemecahan masalah atas kajian yang diteliti dan dalam mencari jawaban diperlukan metode penelitian yang cukup dan dilakukan dalam berbagai tahapan dalam penelitiannya.

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dengan jenis penelitian Kualitatif dengan teknik Deskriptif dengan melakukan penelitian secara langsung di Kabupaten Ketapang. Metode ini menjadi salah satu cara peneliti untuk dapat mendalami lebih jelas, dan juga mendapatkan data sesuai yang diinginkan. Metode ini juga memiliki tujuan untuk medeskripsikan kondisi *real* atau kondisi langsung bagaimana dampak Kebijakan PPKM Mikro yang diberlakukan oleh Pemerintah Ketapang kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat Ketapang.

b. Jenis dan sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data menjadi salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian. Data tersebut di dapatkan berdasarkan kondisi atau fakta lapangan yang terjadi selama penelitian ini dilakukan. Data tersebut juga

kemudian dikumpulkan dilakukan dengan berbagai *setting* dengan proses sehingga mendapatkan data terbaik. Untuk jenis data yang digunakan, data primer didapatkan dengan peneliti melakukan wawancara langsung ke berbagai pihak terkait yang menjadi pemangku pembuat kebijakan tidak lain adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang, dan juga individu-individu penting yang terkena dampak langsung dari Kebijakan PPKM Mikro. Lalu untuk data sekunder berasal atau diperoleh dari berbagai sumber-sumber yang terverifikasi, seperti dokumen resmi milik Pemerintah, artikel resmi dan juga sumber-sumber lain yang dapat mendukung data yang ada serta valid.

Tabel 1.3 Data Primer

Data	Data Tentang	Informan	Teknik Pengumpulan data
Primer	Kebijakan PPKM	Ketua DPRD Komisi I Kabupaten Ketapang	Wawancara
Primer		Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wawancara
Primer		Satuan Polisi Pamong Praja Pegawai Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat seksi Penegak Perda	Wawancara
Primer	Kondisi dan data Pasien Covid-19	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	Wawancara

		Ketapang	
Primer	PPKM Mikro dan Dampak Sosial	Kepala Kelurahan Tengah	Wawancara

Tabel 1.4 Data Sekunder

Data	Data Tentang	Informan	Teknik Pengumpulan data
Sekunder	Arsip Realisasi Kebijakan PPKM Mikro	Pemerintah Kabupaten Ketapang	Dokumentasi
Sekunder	Artikel, Jurnal, Berita yang terkait dengan kebijakan PPKM Mikro	Pihak ketiga (Media Online)	Dokumentasi

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data serta informasi dalam sebuah penelitian kualitatif, yang dimana Ahli Singh, wawancara merupakan posisi dalam sebuah situasi yang saling berhadapan yang terjadi antara pewawancara dengan respon dengan tujuan untuk menggali sebuah informasi yang diinginkan, minimum bias dan juga maksimum efisiensinya (Singh, 2002). Sehingga dari pertemuan atau *interview* ini menghasilkan data yang tervalidasi secara jelas.

2) Dokumentasi

Teknik selanjutnya ini merupakan teknik pengumpulan data menggunakan berbagai informasi penting seperti informasi kondisi dan juga fakta. Dalam teknik ini juga peneliti mengambil berbagai dokumen, catatan, arsip administrasi penting yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ketapang dan juga beberapa peraturan yang menjadi salah satu perwujudan program PPKM Mikro yang terjadi di Kabupaten Ketapang sebagai bentuk pengendalian Covid-19.

3) Observasi

Metode observasi adalah sebuah teknik yang menjadi cara dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung diikuti dengan proses pencatatan terhadap keadaan sekitar (Fathoni, 2006). Dalam teknik observasi ini juga peneliti hanya bertindak sebagai pengamat langsung terhadap kejadian atau fenomena yang terjadi selama penelitian yang kemudian dilakukan pencatatan dan dilakukan analisa pada bagian akhir.

d. Teknik Analisis Data

Teknik ini merupakan pencarian dan proses untuk menata data secara sistematis, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang sedang diteliti. Seorang ahli yaitu Bogdan dan Biklen dalam (P. Irawan, 2006) “Menjelaskan bahwa analisis data merupakan sebuah proses guna mengatur dan mencari secara sistematis

sebuah transkrip *interview* yang berupa catatan atau bahan yang didapatkan dan dikumpulkan guna meningkatkan pemahaman akan sebuah fenomena yang terjadi. Dalam teknik analisis data ini juga menggunakan beberapa cara yang dikeluarkan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut:

1) Reduksi data

Dalam tahapan ini reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilahan atau pemilihan data yang telah didapatkan dan kemudian disederhanakan data tersebut sesuai kepentingan penelitian yang dilakukan. Pada tahap pengumpulan data, terjadi reduksi data dimana terjadi pembuatan ringkasan, pengelompokan tema, pembuatan kode dan pemartisian, sehingga pada bagian akhir dapat dilakukan analisis dengan menghasilkan pola-pola khusus.

2) Penyajian data

Pada bagian ini dilakukan dengan proses pengkategorian serta penyusunan informasi ataupun data yang diperoleh. Dari penyusunan yang terstruktur tersebut dapat menghadirkan kemungkinan dalam pengambilan kesimpulan. Penyajian data juga bertujuan memudahkan dalam memahami apapun yang terjadi sehingga mudah dipahami.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahapan ini peneliti mencari makna dari data yang telah didapatkan yang kemudian peneliti melakukan analisis data dan menjadi jawaban dalam penelitian yang dilakukan. Hasil dari

kesimpulan tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif berdasarkan pada kajian yang telah direduksi.